

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini akan membahas antara lain latar belakang masalah yang diangkat sebagai topik dalam skripsi ini, yakni mengenai kegagalan Amerika Serikat dalam melancarkan ambisi neoimperialismenya di Uzbekistan, berikut rumusan masalah, serta kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut, hingga kemudian didapatkan hipotesis atau kesimpulan sementara atas masalah yang dibahas. Selanjutnya, akan dipaparkan pula jangkauan penelitian, tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar tetap logis dan sistematis.

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat sebagai negara imperialis, memiliki ambisi untuk memperluas kekuasaannya di seluruh dunia dengan berbagai macam cara yang dapat dilakukan. Khususnya di era modern ini, dengan segala perkembangan tatanan dunia global yang ada, termasuk dengan perubahan orientasi dan prioritas politik luar negerinya, pada era neoimperialisme ini Amerika Serikat diantaranya melakukan usaha-usaha antara lain dengan mengklaim dirinya sebagai polisi demokrasi dan penegak Hak Asasi Manusia untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih beradab dan sejahtera. Dengan ini, kemudian Amerika dapat melancarkan

pengaruh seluas-luasnya, terutama di negara-negara dunia ketiga. Dengan melancarkan pengaruhnya, maka Amerika Serikat dapat memperoleh banyak keuntungan tidak hanya secara ekonomi dan politik namun lebih lanjut dapat memperkuat posisinya sebagai negara hegemoni di mata dunia internasional.

Kawasan Asia Tengah merupakan salah satu wilayah yang paling berpotensi di dunia. Pada awal Abad Ke-20, Sir Halford Mackinder, seorang ahli geografi Inggris, mengatakan bahwa Asia Tengah akan selalu menjadi kawasan yang sangat penting di dunia, dan penguasaan Asia tengah berarti mengontrol *heartland* (lingkar benua) dan kemudian dunia (Wang, 2001). Hal ini tentu saja tidak luput oleh Amerika Serikat, untuk melancarkan ambisi imperialismenya di kawasan yang terdiri dari negara-negara hasil pecahan Uni Soviet tersebut, dalam hal ini khususnya di Republik Uzbekistan. Baik secara geografis, politik, budaya, maupun ekonomi, Uzbekistan merupakan salah satu bagian dari Kawasan Asia Tengah yang memiliki potensi strategis dibanding negara yang lainnya. Uzbekistan juga merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia. Bahkan menurut situs resmi Lembaga Pemerintah Amerika Serikat; United States Agency International Development (USAID), Uzbekistan memainkan peran penting sebagai negara terpadat di Asia Tengah dengan sumber daya alam yang luas dan jaringan transportasi, sehingga merupakan kekuatan potensial untuk pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas di kawasan itu¹. Oleh karenanya, sebagai salah satu bagian dari Kawasan Asia Tengah yang tergabung dalam *Commonwealth Independent States* (CIS), Uzbekistan merupakan negara yang berpengaruh terhadap negara-negara di sekitarnya. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat dapat melancarkan pengaruhnya ke Uzbekistan, tidak hanya keuntungan dari Uzbekistan saja yang bisa diperoleh, melainkan lebih lanjut hingga ke Kawasan Asia Tengah.

Bagaimana Amerika Serikat kemudian mulai melakukan usahanya dalam memperluas kekuasaannya di Uzbekistan, adalah melalui hubungan kerja sama diantara kedua pihak. yang mana hal ini sangat identik dengan karakteristik neoimperialisme. Bahwa bentuk perluasan kekuasaan tidak serta merta berupa paksaan, tetapi melalui kesepakatan atas dasar kepentingan bersama.

Amerika Serikat mulai menjalin kerja sama yang signifikan dengan Republik Uzbekistan *pasca* momentum *World Trade Center* (WTC) WTC September 2001, yang pada awalnya didasarkan atas keinginan Amerika Serikat untuk mendukung operasi militer di Afghanistan dalam rangka melawan terorisme. Hal ini didukung oleh fakta bahwa secara politik, Uzbekistan yang merupakan negara Republik telah meninggalkan ideologi lama sisa sisa peninggalan soviet. Negara ini kemudian berfokus terhadap

¹USAID (2016). *About Uzbekistan*. Diakses pada November 20, 2016, dari United States Agency International Develepment: <http://www.usaid.gov/uzbekistan>

Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun terkait Afghanistan, Uzbekistan memposisikan diri secara jelas, bahwa secara aktif dan tajam terlibat dalam dialog dengan AS, NATO dan Rusia, yang bersama-sama sepakat bahwa instabilitas di Afghanistan akan mengalami peningkatan dan lebih lanjut dapat mempengaruhi keamanan regional. Maka kemudian, Amerika Serikat melihat peluang tersebut sehingga kerja sama antara kedua negara secara resmi ditandatangani melalui *Declaration on Strategic Partnership and Cooperation Framework*, ditandai dengan kunjungan Presiden Islam karimov ke Amerika Serikat pada 12 Maret 2002 dimana kedua belah pihak menyepakati pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Uzbekistan, yang selanjutnya disebut juga dengan Karshi Khanabad (K-2) *Military Airbase*.

Lebih lanjut, berdasarkan US Department of State bahwa di dalam poin-poin kesepakatan yang termaktub di dalam *Declaration on Strategic Partnership and Cooperation Framework* tersebut, kerja sama antara kedua negara tidak hanya terkait militer dan keamanan, melainkan juga meliputi politik, ekonomi, hak asasi serta sumber daya manusia dengan prinsip-prinsip utama yang menjunjung tinggi norma-norma sesuai hukum internasional, kedaulatan, integritas wilayah dan prinsip *non-interference*. Melalui kerja sama tersebut, meskipun dituliskan secara jelas bahwa tetap berpegang pada prinsip *non-interference*, namun sangat terlihat betapa Amerika Serikat

memasukkan berbagai elemen di dalamnya, terutama terkait demokratisasi dan Hak Asasi Manusia yang kemudian secara tidak langsung tentu saja akan berujung pada intervensi Amerika Serikat secara lebih dalam di Republik Uzbekistan nantinya.

Bagaimana Amerika Serikat melancarkan ambisi neoimperialismenya di Uzbekistan, semakin terlihat dengan adanya kesepakatan lain yang juga diratifikasi pada Maret 2002. Uzbekistan yang secara ekonomi bergantung terutama pada pertanian dan sumber daya alam juga menjadi produsen utama energi dan mineral, dengan uranium sebagai salah satu ekspor terbesar ke Amerika Serikat pada saat itu², juga menyepakati dokumen lainnya dengan Amerika Serikat antara lain perjanjian kerjasama terkait fasilitas nonproliferasi nuklir, kemudian perluasan kerangka kemitraan strategis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang paling mengarah kepada karakteristik neoimperialisme, yakni terkait ekonomi, adalah kesepakatan yang pada saat itu secara langsung melalui Wakil Ketua Bank Ekspor-Import Eduardo Aguirre, Jr dan Kepala Bagian Aktivitas Ekonomi Bank Nasional Uzbekistan Zainutdin Mirkhodjaev mengenai fasilitas sebesar \$55 juta penjaminan kredit jangka menengah untuk mendukung pembelian barang dan jasa Amerika Serikat oleh perusahaan skala kecil dan menengah milik

²US Department of State. (2008, Desember). *Background Note: Uzbekistan*. Diakses pada January 9, 2017, dari US Department of State: <https://2001-2009.state.gov/t/pa/ei/bgn/2924.htm>

Uzbekistan³. Dari sini terlihat bagaimana usaha Amerika Serikat yang pada awalnya didasarkan atas kepentingan kedua negara atas jaminan keamanan terkait stabilitas regional, ternyata juga mengarah kepada aspek ekonomi yang merupakan aspek utama dari sifat neoimperialisme oleh negara maju terhadap negara berkembang.

Pada Tanggal 29 Juli 2005, Anggota Parlemen Uzbekistan yang masih berada di bawah kepemimpinan Presiden Islam Karimov secara tiba-tiba memberi pernyataan secara resmi mengenai waktu 180 hari yang diberikan untuk Amerika Serikat agar menarik dan mengosongkan pangkalan militernya di Karshi Khanabad (Washington File Staff Writer, 2005). Uzbekistan membatalkan kerja sama yang tengah terjalin dengan Amerika Serikat, atau dengan kata lain Amerika Serikat gagal dalam rangka menjalankan politik luar negerinya di Uzbekistan. Hal ini mengikuti momentum dimana permohonan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Organisasi Kerja sama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization (SCO); kerja sama perbatasan ekonomi dan kebudayaan antara negara-negara di kawasan Asia ditolak, sementara Iran, Mongolia, dan Pakistan telah diterima sebagai negara pengamat⁴. Sementara itu, hubungan antara Uzbekistan dengan Rusia kembali

³US Department of State. (2002, Maret). *Archive*. Diakses pada April 24, 2017, dari US Department of State: <https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/8735.htm>

⁴Fedoruk Vladimir (2011). *Russia and China Want Pakistan in SCO and USA Rejected*. Diakses pada Februari 7, 2017, dari <https://defence.pk/threads/russia-and-china-want-pakistan-and-india-in-sco-and-usa-rejected.138151/>

intens ditandai dengan diratifikasinya perjanjian kerja sama strategis oleh kedua pihak.

Adapun terkait penarikan pangkalan militernya di Karshi Khanabad, berdasarkan US Fed News Service, Including US State News (2005) bahwa melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Sean McCormac, Amerika Serikat memberikan pernyataan resmi berdasarkan pertemuan selama tiga jam antara Asisten Menteri Amerika Serikat, Daniel Fried dengan Presiden Islam Karimov. Amerika Serikat menyatakan bahwa terlepas dari keputusan penarikan pasukan di *K-2 Base*, Uzbekistan tetap diharapkan dapat menjadi partner kerja sama yang baik, yang dengan kata lain kedua negara dapat memperbaiki hubungan di semua elemen dari agenda yang pernah disepakati. Juru Bicara McCormac menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus mendorong Uzbekistan pada aspek politik serta reformasi ekonomi.

Uraian diatas menggambarkan bagaimana Amerika Serikat mulai menjalin kerja sama dengan Republik Uzbekistan hingga kemudian mengalami kegagalan di tengah perjalanannya, atau dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat kehilangan kesempatannya untuk dapat secara lebih luas mengambil posisi strategis di di kawasan Asia Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka kemudian dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Mengapa Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam melancarkan ambisi imperialismenya di Republik Uzbekistan?

C. Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya teori yang akan menjadi alat untuk menemukan jawaban atas masalah yang ada. Sebagaimana oleh Mochtar Mas'ood (1990), dinyatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, sehingga berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi serta mungkin dapat meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian tersebut di masa depan.

Adapun dalam penelitian ini, untuk menganalisis masalah yang terjadi yakni mengenai bagaimana Amerika Serikat dapat mengalami kegagalan di Uzbekistan, digunakan teori neoimperialisme.

Teori Neomperialisme

Neoimperialisme atau imperialisme baru pada dasarnya merupakan lanjutan atau model terkini dari adanya teori imperialisme yang digagas oleh para penganut sosialisme. Maka dari itu, terlebih dahulu perlu untuk kita memahami bagaimana imperialisme sebagai cikal bakal untuk kemudian melangkah kepada neoimperialisme yang merupakan bentuk terkini dari imperialisme itu sendiri.

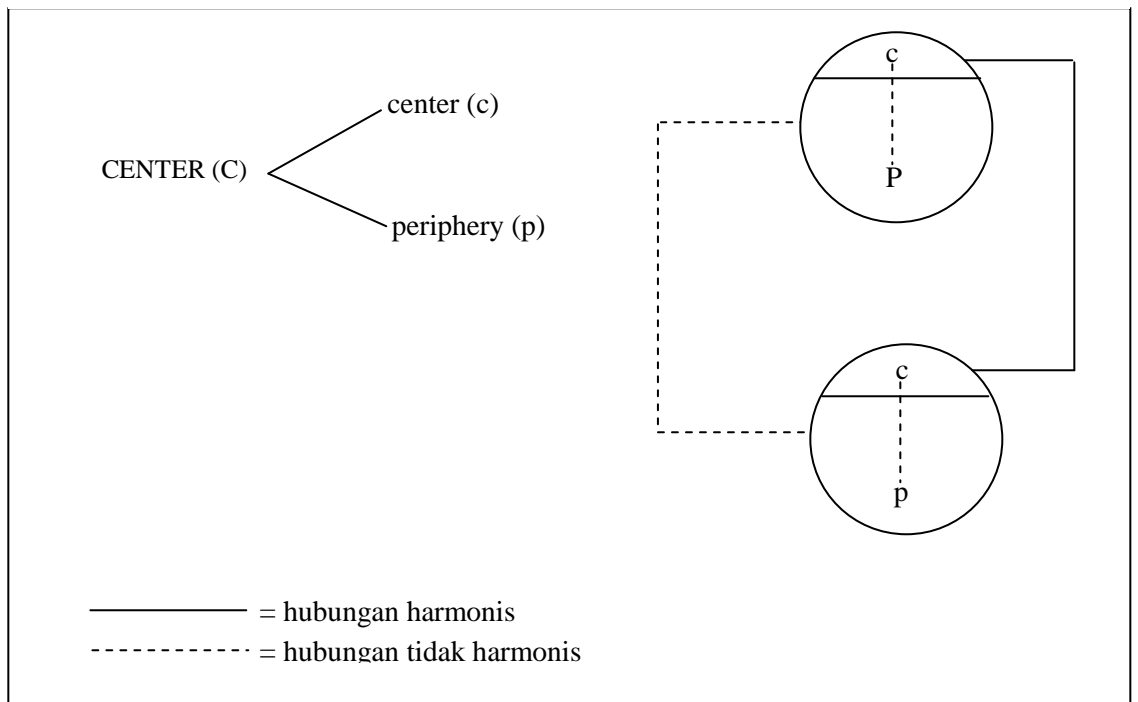
Mengenai Teori imperialisme, Vladimir Ilyich Lenin mengaitkannya dengan pesatnya perkembangan kapitalisme. Menurut Lenin, imperialisme merupakan tahapan terkini yang tidak dapat dihindari dalam logika suatu krisis kapitalisme. Imperialisme lahir di setiap krisis kapitalisme yang terjadi. Kemudian untuk dapat terbebas dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar bisa mendapatkan pasar baru, mengekspansi batas-batas negara-bangsa hingga kemudian menemukan lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang lebih murah (Suseno, 2001).

Adapun menurut Johan Galtung (Dalam Mas'ood, 1990), Imperialisme dilahirkan dari suatu struktur hubungan internasional yang tidak seimbang. Johan Galtung mencoba menggambarkan suatu struktur hubungan internasional yang bersifat asimetris (timpang), dyadic (satu-lawan-satu) dan vertikal antara dua jenis aktor, yaitu aktor *Center* (negara maju) dan aktor *Periphery* (negara kurang maju). Struktur hubungan asimetris yang disebutnya imperialisme berwujud hubungan di mana negara *Center* memiliki kekuasaan atas negara *Periphery*, sehingga tercipta suatu kondisi disharmoni atau ketidakselarasan di antara keduanya.

Berikut ini sifat-sifat hubungan imperialisme menurut Johan Galtung (Dalam Mas'ood, 1990):

1. Terdapat adanya keselarasan kepentingan antara *center* (elite) di negara Center (negara maju) dengan *center* di negara Periphery (negara kurang maju).
2. Terdapat lebih banyak ketidakselarasan atau konflik kepentingan antara *center* dan *periphery* (massa) di negara Periphery daripada di negara Center.
3. Terdapat ketidakselarasan atau konflik kepentingan antara *periphery* dari negara Center dengan *periphery* dari negara Periphery.

Gambar 1.1 Struktur Hubungan Imperialisme Johan Galtung



Sumber: Johan Galtung (Dalam Mochtar Mas'oe'd, 1990)

Pada model struktur hubungan di atas, terlihat bahwa antara *center* milik negara Center memiliki hubungan dengan posisi yang sangat strategis yakni langsung dengan bagian *center* di negara Periphery. Dengan begitu, *center* di negara Periphery terikat pada *center* di Center atas dasar hubungan yang kuat, yakni keselarasan kepentingan. Fenomena yang akan terjadi dengan adanya hubungan tersebut misalnya adanya kemiripan antara kondisi dan perilaku elite di negara kurang maju yang menjadi periphery dengan kondisi dan perilaku elite di negara maju. Menurut Johan Galtung, orientasi ekonomi, sosial, politik, dan kultural para elite negara dunia ketiga umumnya ke Amerika Serikat, Eropa Barat, atau Jepang.

Menurut Chomsky (2008) dalam pengantar bukunya “Neoimperialisme Amerika Serikat” mengungkapkan bahwa berdasarkan pandangan Lenin, imperialisme dicirikan oleh lima hal, *pertama*, konsentrasi kapital, baik dalam bentuk konglomerasi maupun monopoli; *kedua*, meleburnya kekuasaan kapital finans; *ketiga*, ekspor kapital dalam bentuk investasi-investasi industrial; *keempat*, pembagian ekonomi dunia oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan korporasi transnasional melalui kartel internasional; *kelima*, pembagian politik dunia oleh negara-negara maju.

Kemudian, Chomsky (2008) mengungkapkan imperialisme berdasarkan perspektif seorang Marxis berkebangsaan Mesir; Samir Amin yang mengkritik Lenin, bahwa Imperialisme bukan berupa tahap-tahap, melainkan

inhern dalam setiap ekspansi kapitalisme. sepanjang sejarahnya, imperialisme telah memasuki dua fase dan sedang memasuki fase yang ketiga.

Fase pertama, terjadi pada masa ekspansi kapital merkantilis Eropa Atlantis yang menghancurkan Benua Amerika dengan Spanyol dan Inggris sebagai aktor utamanya. *Fase kedua* adalah pada masa revolusi industri Inggris yang berujung pada penaklukan Asia dan Afrika. Penundukan kolonial ini berupaya untuk mencari dan membuka pasar baru bagi perdagangan Eropa. Imperialisme fase kedua ini menghasilkan perang-perang dunia besar antara kekuatan imperialis untuk mempertahankan koloninya. Namun juga menghasilkan berbagai perlawanan yang terus menentang proyek-proyek imperialis, seperti lahirnya revolusi sosialis di Rusia dan China dan tumbuhnya berbagai revolusi pembebasan nasional di negara Asia dan Afrika. Kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut tidak lantas menghancurkan kekuatan-kekuatan imperialis, yang diantaranya merupakan kekuatan-kekuatan kolonialis lama seperti Belanda, Inggris, dan Perancis serta negara kapitalis baru yang muncul pada abad ke-19 seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang, tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan ‘situasi baru’ ini. Kaum imperialis ini segera mengubah pandangan tradisionalnya bahwa pertumbuhan kapitalis mereka sangat bergantung dari seberapa besar wilayah koloni yang mereka ekspansi. Dengan keunggulan sebagai negara yang maju, kaya raya, dan memiliki sumberdaya manusia serta teknologi yang tinggi,

mereka segera mengubah modus dominasinya menjadi imperialisme baru, imperialisme tanpa koloni (Chomsky, 2008).

Imperialisme yang telah memasuki *fase ketiga* ditandai dengan runtuhnya sistem Soviet dan rejim-rejim nasionalis-populis di Dunia Ketiga. Pada dasarnya, tujuan dari imperialisme fase ini masih sama dengan fase-fase sebelumnya, yaitu mengukuhkan dominasi kapital, memperluas dan mengekspansi pasar baru, menjarah sumberdaya agraria, dan melakukan supereksplorasi pada tenaga kerja di negara-negara pinggiran, dengan modus baru berupa wacana-wacana berorientasi ideologis yang siang menguatkan hegemoni imperialisme tahap ketiga ini. Wacana-wacana tersebut diantaranya meliputi demokrasi, humanitarianisme, hak asasi manusia, pasar bebas dan kesejahteraan, serta pemerintahan yang bersih dan baik yang dalam pelaksanaannya dikerjakan dengan model standar ganda, dan hanya dilakukan demi memperlulus akumulasi kapital oleh negara-negara maju pada negara-negara berkembang di tengah-tengah arus perkembangan zaman yang begitu pesat. Para ilmuwan cenderung tidak bersepaham satu sama lain dalam memandang tatanan global pada era ini. Sebagian mendefinisikannya dengan cara baru, sembari mendeklarasikan suatu era ‘pos-imperialis’, sementara yang lain berpendapat bahwa imperialisme tidak pernah berakhir, hanya memakai modus baru dengan motif lama yang tetap sama. Seperti anggur lama yang dituangkan dalam botol baru (Chomsky, 2008).

Selanjutnya, dikemukakan oleh Chomsky (2008) mengenai perdebatan *Empire* dan Imperialisme yang menjadi latar belakang gagasan *Empire* oleh Michael Hardt dan Antonio Negri. Di dalam karyanya, Hardt dan Negri menekankan bahwa di zaman post-kolonial atau post-imperialis ini tidak ada lagi peran kedaulatan negara-bangsa sebagai faktor pendorong, melainkan telah tergantikan dengan kedaulatan global atau *kedaulatan imperium* yang merupakan hasil dari adanya gabungan antara “serangkaian organisme nasional atau supranasional yang disatukan di bawah suatu logika aturan tunggal” tanpa adanya hierarki internasional yang jelas. Gagasan *Empire* ini mengumandangkan kematian imperialisme dikarenakan tidak sesuai antara manifestasi imperialisme itu sendiri dengan tujuannya yang berkaitan dengan logika pasar. Imperialisme akan menyebabkan matinya arus kapital atau memfasilitasi arus yang lainnya, sementara pasar dunia membutuhkan suatu akses yang luas untuk pergerakan bebas arus kapital. Dengan kata lain, imperialisme harus musnah untuk terbentuknya pasar dunia. Jadi, imperialisme bertentangan dengan tatanan global saat ini, yang kemudian digantikan oleh sejenis kekuasaan imperium baru. Adapun terkait peran negara-bangsa yang telah tergantikan, Hardt dan Negri menyatakan bahwa dunia pada saat ini, tidak dipimpin ataupun dipandu oleh negara-bangsa manapun, termasuk Amerika Serikat atau negara besar lainnya melainkan oleh sejenis rejim konstitusionalisme. Adanya tindakan unilateral Amerika Serikat

bukan merupakan wujud proyek imperialis, melainkan kepentingan tatanan imperium global. Misalnya sebagaimana ditunjukkan dalam keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Teluk, bahwa menurut Presiden George Bush bahwa tindakan tersebut adalah untuk menegakkan tatanan dunia baru (*new global order*). Secara singkat, *Empire* adalah suatu produk dari pertarungan atas kedaulatan dan konstitusionalisme, dimana konstitusi dari suatu negara bisa dipaksakan untuk menjadi aturan pada level global.

Lebih dalam, James Petras dan Henry Veltmeyer melalui karyanya *Empire With Imperialism* mengkritik gagasan *Empire* bahwa asumsinya mengenai perkembangan dinamika kapitalisme global terkini yang mengabaikan peranan negara imperial dalam membentuk perkembangan kapitalisme global, dan mengukuhkan serta mengabadikan sistemnya. Kekuasaan negara (imperial) sesungguhnya merupakan faktor esensial dalam ekonomi politik dunia saat ini (Chomsky, 2008).

Imperialisme baru menurut Petras dan Veltmeyer, merupakan definisi tatanan global saat ini yang diwarnai oleh isu pasar bebas, globalisasi dan pembangunan dunia sebagai perwujudan proyek pendudukan atas rakyat dan seluruh negara di dunia di bawah kepentingan dan kekuasaan negara imperial. Adalah naif, untuk menyangkal bahwa Amerika merupakan negara super power dan hegemon dengan kekuasaannya atas elemen ekonomi baik terkait aktor perusahaan multinasional maupun rejim keuangan internasional, serta

politik yang sangat kuat dan selalu mungkin untuk mengagresi negara lain kapan saja. Dalam beberapa tahun terakhir, peran negara-negara imperial, utamanya Amerika Serikat dalam menopang sistem dan aktivitas ekonomi, politik, dan kebudayaan dunia sangat meningkat pesat seiring dengan meningkatnya kekuatan yang dimilikinya, terutama dari segi sumberdaya finansial. Mereka kemudian mengambil keuntungan dari krisis, penyebaran pasar bebas, serta pembangunan ekonomi di negara-negara dunia ketiga. Dengan ini, maka dengan pasti Petras dan Veltmeyer menyebut globalisasi dan tatanan global saat ini sebagai imperialisme abad 21 (Chomsky, 2008).

Maka, dapat kita pahami bahwa ‘imperialisme baru’ atau neoimperialisme atau imperialisme Abad 21 merupakan model baru dari imperialisme, yang pada dasarnya masih memiliki tujuan yang sama yakni perluasan kekuasaan oleh negara maju atas negara berkembang, diwarnai dengan modus gaya baru berupa penyebaran ke seluruh dunia atas isu-isu pasar bebas, globalisasi, Hak Asasi Manusia, demokratisasi dan pembangunan dunia.

Imperialisme baru atau neoimperialisme berbeda dari yang sebelumnya, pertama, menggantikan pertumbuhan ambisi *empire* tunggal secara teori dan praktik yang bersaing satu sama lain, dimana masing-masing termotivasi oleh ambisi yang serupa yakni perluasan pengaruh politik dan

keuntungan komersial; Kedua, dalam dominasi keuangan atau investasi atas kepentingan dagang (Lenin, 2010).

Selanjutnya David Harvey (2003) dalam pengantar bukunya “*The New Imperialism*” mengemukakan bahwa di satu sisi, peristiwa pada tatanan global terkini yang bergerak cepat, membuatnya sangat sulit untuk merancang seperangkat materi mengenai neoimperialisme. Namun, di sisi lain, sifat dari berbagai peristiwa yang terjadi dan ancaman yang dihadirkan secara ekonomi, politik, dan militer terhadap keamanan global membuat semacam proposal analisis lebih dalam. Dalam bukunya tersebut David Harvey menjelaskan Neoimperialisme melalui poin-poin meliputi *All about oil*, bagaimana Pertumbuhan kekuatan Amerika Serikat, Perbudakan kapital, serta kesepakatan atas tindakan koersi.

Neoimperialisme bersifat terkini dan tetap menunjukkan Karakteristik imperialisme khususnya di bidang ekonomi sebagaimana yang digambarkan oleh Lenin. Karakteristiknya terdiri atas susunan yang lebih baru, meliputi bentuk keuangan konsentrasi modal, industri, dan jasa. Perusahaan asuransi, dana pensiun, dana investasi, dan instrumen keuangan baru memainkan peran penting dalam pasar keuangan yang berdaulat dan bergejolak yang telah menghasilkan krisis ekonomi dunia global pada tahun 2008. Ekspor modal saat ini jauh lebih penting daripada pada Era 1945-1975. Perusahaan transnasional memainkan peran penting. Perekonomian dunia

dapat diidentifikasi, negara maju mendominasi ekspor modal dan perdagangan dunia. Eropa saat ini adalah aktor terpenting dalam impor dan ekspor barang modal dan barang. China telah menjadi negara pengekspor penting dan lokasi penting untuk arus masuk FDI. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Prancis, Italia dan Spanyol telah mencapai peningkatan relatif penting dalam ekspor modal, sementara Amerika Serikat telah secara signifikan kehilangan saham dalam ekspor dunia pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke 21. Cina pada saat bersamaan juga mengimpor dan mengekspor besar. Konflik militer membentuk imperialisme baru. Munculnya kelompok militer transnasional (Contoh: Al-Qaeda) menjadi sebuah bentuk ancaman baru dunia. Dalam bentuk neoimperialisme, faktor keuangan merupakan faktor yang dominan dalam rangka melancarkan kekuasaan oleh negara kuat ke negara berkembang (Fuchs, 2013).

Dalam kasus Amerika Serikat dengan Uzbekistan, dapat ditinjau bagaimana ketidakselarasan kondisi antara kedua negara tersebut terhubung atas dasar kesamaan kepentingan terutama terkait keamanan dan ekonomi dengan modus penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Kondisi dunia modern dengan berbagai gejolak yang ada telah membawa Amerika Serikat sebagai salah satu aktor besar dalam perlombaan politik luar negeri neoimperialisme di dunia, dengan arah kebijakan yang semakin kompleks.

Dengan kepentingan strategisnya, menjalin kerja sama dengan Republik Uzbekistan sebagai lahan baru bagi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya tidak hanya untuk keuntungan kapitalisme yang berorientasi pada ekonomi dan ketenagakerjaan, melainkan juga terkait orientasi politik dan keamanan yang menjadi salah satu prioritas paling utama politik luar negeri Amerika Serikat di masa ini. Hal tersebut didukung oleh posisi strategis Uzbekistan baik secara politik maupun geografis, yang tentu saja akan sangat menguntungkan bagi Amerika di masa yang akan datang.

Pada dasarnya, ketika Republik Uzbekistan khususnya pada pihak elit pemerintahannya, merasa bahwa antara pihaknya dengan elit Amerika khususnya memiliki keselarasan kepentingan, maka terjalinlah hubungan kerja sama yang mana sesuai dengan teori neoimperialisme bahwa Amerika Serikat dalam hal ini sebagai negara maju yang lebih kuat memiliki ambisi khusus terhadap Uzbekistan. Dalam hal ini, adanya kesadaran elit Uzbekistan atas ambisi tersebut sehingga kemudian menyebabkan pemutusan hubungan kerjasama diantara keduanya dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan dari usaha Amerika Serikat dalam rangka melancarkan ambisi neoimperialismenya di Republik Uzbekistan.

Di sisi lain, hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat dan Uzbekistan tidak lepas kaitannya dari Rusia. Rusia dengan latar belakang antineoimperialis, yang juga memiliki kedudukan sebagai sentral dari

Commonwealth Independent States (CIS) dimana Uzbekistan tergabung di dalamnya tentu tidak akan tinggal diam atas kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dengan negara mantan jajahan Uni Soviet dengan jumlah populasi terbesar tersebut. Dalam hal ini, peran Rusia sebagai negara kuat dengan posisinya yang dekat dengan Uzbekistan menjadi faktor eksternal yang mendorong kegagalan Amerika Serikat dalam melancarkan ambisi neoimperialismenya di Uzbekistan.

D. Hipotesis

Sebagai hipotesa, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam melancarkan ambisi imperialismenya di Republik Uzbekistan, didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor internal; kesadaran elit Uzbekistan terhadap kecenderungan neoimperialisme Amerika Serikat di negaranya
2. Faktor eksternal; Reaksi Rusia sebagai sentral dari aliansi *Commonwealth Independent States* (CIS) dengan kembali merangkul Uzbekistan

E. Jangkauan Penelitian

Untuk mencegah melebarnya pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, maka diberi batasan atas permasalahan yang akan dibahas yakni meliputi kegagalan Amerika Serikat dalam rangka melancarkan ambisi

neoimperialismenya di Uzbekistan khususnya pada kerja sama strategis yang terjalin antara kedua negara pada Tahun 2002-2005.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat menjalankan ambisi neoimperialismenya di kawasan Asia Tengah secara umum dan di Republik Uzbekistan secara khusus, melalui kerja sama strategis yang dilakukan, serta mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab kandas atau gagalnya perjalanan Amerika dalam melancarkan usahanya tersebut di Republik Uzbekistan.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanasi, untuk menjawab atau menjelaskan mengenai pertanyaan “mengapa” atas masalah yang telah dirumuskan.

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Tujuan penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, proses-proses sosial (Bakry, 2016).

Adapun di dalam penyusunannya, penelitian ini didukung oleh teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan cara studi pustaka. Proses

pengumpulan data ini dilakukan terhadap sumber sekunder seperti buku teks, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah, serta bahan-bahan lain. Penggunaan dokumen sekunder adalah dokumen yang mengacu kepada dokumen primer atau menganalisis dokumen primer. Tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan penelitian berbasis internet (*internet-based research*). Pemanfaatan internet selain untuk mengakses materi ilmiah tradisional (seperti artikel jurnal ilmiah dan buku), serta dapat dioptimalkan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang diajukan (Bakry, 2016).